



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

# RENJA PERUBAHAN SATPOL P3KP TAHUN 2024



Jl. Majapahit No. 7 Kota Pekalongan



[satpolpekalongankota@gmail.com](mailto:satpolpekalongankota@gmail.com)



[satpolpp.pekalongankota.go.id](http://satpolpp.pekalongankota.go.id)



[satpolpp.kotapekalongan](https://www.instagram.com/satpolpp.kotapekalongan)



Satpol News Kota Pekalongan

**BerAKHLAK** **#bangga**  
BerAKHLAK Melayani Kita Bangsa dan Negara  
Pelayanan yang Berkualitas Kita Berkarya  
**melayani**  
**bangsa**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

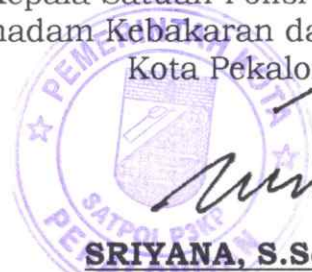
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,  
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,  
Kota Pekalongan,



**SRIYANA, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680709 199003 1 008

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR.....  | i  |
| DAFTAR ISI.....  | ii |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 2  |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan.....   | 2  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 3  |
| BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....  | 4  |
| 2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan<br>dan Anggaran Kegiatan Renja SATPOL PP Kota Pekalongan sampai<br>dengan Triwulan II Tahun 2024..... | 4  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 13 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....   | 17 |
| BAB IV PENUTUP.....  | 26 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan peralihannya dimana menyebutkan setiap Pemerintah di Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 20 tahun, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu pembangunan selama 5 tahun.

Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut dituangkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mencakup sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).

Hal tersebut diatas kemudian diatur dan didasari juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan atas Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

## **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan atas Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan arah kebijakan dan strategi serta menelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RKP Kota Pekalongan Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan landasan operasional bagi para pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Menjadi salah satu dokumen pengawasan dan pengendalian untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Mengukur tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dalam menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Berisi hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi pagu anggaran dan target kinerja perubahan tahun 2024

##### **BAB V PENUTUP**

Berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 360 menyebutkan bahwa penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II, seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/ Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |         | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |       |
|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
|  |  |   | Target                 | Satuan  | Fisik                             | %     |
| 1  | 2  | 3   | 4                      | 5       | 6                                 | 7     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000   | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                            |   |                        |         |                                   |       |
| 1.05   | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |   |                        |         |                                   |       |
| 1.05.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja   | 100                    | persen  | 38,89                             | 38,89 |
|  |  | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100                    | persen  | 33,81                             | 33,81 |
|  |  | Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah   | 100                    | persen  | 9,51                              | 9,51  |
| 1.05.01.2.01   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                | 100                    | persen  | 11,11                             | 11,11 |
| 1.05.01.2.01.01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2                      | dokumen | 0                                 | 0     |
| 1.05.01.2.01.02  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2                      | dokumen | 0                                 | 0     |
| 1.05.01.2.01.07  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 15                     | Laporan | 5                                 | 33,33 |



| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |             | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |        |
|---|--|--|------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
|   |  |  | Target                 | Satuan      | Fisik                             | %      |
| 1.05.01.2.02  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah   | 100                    | persen      | 66,67                             | 66,67  |
| 1.05.01.2.02.01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 37                     | Orang/bulan | 42                                | 113,51 |
| 1.05.01.2.02.03   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12                     | Dokumen     | 6                                 | 50     |
| 1.05.01.2.02.05   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1                      | Laporan     | 1                                 | 100    |
| 1.05.01.2.05.02   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah  | 100                    | persen      | 0                                 | 0      |
| 1.05.01.2.05.02   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 1                      | paket       | 0                                 | 0      |
| 1.05.01.2.06  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah   | 100                    | Persen      | 51,43                             | 51,43  |
| 1.05.01.2.06.01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 4                      | Paket       | 2                                 | 50     |
| 1.05.01.2.06.02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4                      | Paket       | 2                                 | 50     |
| 1.05.01.2.06.03   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 4                      | Paket       | 2                                 | 50     |
| 1.05.01.2.06.04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 4                      | Paket       | 2                                 | 50     |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/ Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |         | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |       |
|--|--|--|------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
|  |  |  | Target                 | Satuan  | Fisik                             | %     |
| 1.05.01.2.06.05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2                      | Paket   | 1                                 | 50    |
| 1.05.01.2.06.06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 2                      | Dokumen | 1                                 | 50    |
| 1.05.01.2.06.09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 150                    | Laporan | 90                                | 60    |
| 1.05.01.2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100                    | persen  | 50                                | 50    |
| 1.05.01.2.08.01  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4                      | Laporan | 2                                 | 50    |
| 1.05.01.2.08.02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12                     | Laporan | 6                                 | 50    |
| 1.05.01.2.09   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100                    | persen  | 9,51                              | 9,51  |
| 1.05.01.2.09.01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 29                     | Unit    | 3                                 | 10,34 |
| 1.05.01.2.09.10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2                      | Unit    | 0                                 | 0     |
| 1.05.01.2.09.0010  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 66                     | Unit    | 12                                | 18,18 |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/ Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |         | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |        |
|--|---|--|------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
|  |   |  | Target                 | Satuan  | Fisik                             | %      |
| 1.05.02  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan   | 66                     | persen  | 60                                | 85,71  |
| 1.05.02.2.01   | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)   | 95                     | persen  | 100                               | 105,26 |
| 1.05.02.2.01.01  | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 300                    | Laporan | 160                               | 53,33  |
| 1.05.02.2.01.02  | Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 2000                   | Laporan | 765                               | 38,25  |
| 1.05.02.2.01.03  | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                      | 40                     | Dokumen | 23                                | 57,50  |
| 1.05.02.2.01.04  | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 2                      | Dokumen | 0                                 | 0      |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/ Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |         | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |       |
|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
|  |  |   | Target                 | Satuan  | Fisik                             | %     |
| 1.05.02.2.01.05  | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 155                    | Orang   | 120                               | 77,42 |
| 1.05.02.2.01.06  | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                       | 2                      | Dokumen | 1                                 | 50    |
| 1.05.02.2.01.09  | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada  | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani   | 4                      | Laporan | 0                                 | 0     |
| 1.05.02.2.02   | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)   | 20                     | Perda   | 12                                | 60    |
| 1.05.02.2.02.0010  | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 12                     | Laporan | 4                                 | 33,33 |
| 1.05.02.2.02.02  | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 48                     | Laporan | 24                                | 50    |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |         | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |       |
|---|---|---|------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
|   |   |   | Target                 | Satuan  | Fisik                             | %     |
| 1.05.02.2.02.03   | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP            | 12                     | Laporan | 6                                 | 50    |
| 1.05.02.2.03  | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                             | Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS  | 16                     | persen  | 8,33                              | 52,08 |
| 1.05.02.2.03.01   | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS  | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                    | 3                      | laporan | 0                                 | 0     |
| 1.05.04   | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   | 100                    | persen  | 100                               | 100   |
| 1.05.04.2.01  | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran   | 100                    | persen  | 100                               | 100   |
| 1.05.04.2.01.01   | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                       | 4                      | Dokumen | 5                                 | 125   |
| 1.05.04.2.01.02   | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 250                    | Laporan | 210                               | 84    |
| 1.05.04.2.01.07   | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis   | 38                     | Orang   | 38                                | 100   |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |                    | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |       |
|---|---|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
|   |   |   | Target                 | Satuan             | Fisik                             | %     |
|   |   | dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran  |                        |                    |                                   |       |
| 1.05.04.2.01.08   | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)   | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 2                      | Desa/<br>Kelurahan | 0                                 | 0     |
| 1.05.04.2.01.0017   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri   | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait  | 3                      | Unit               | 0                                 | 0     |
| 1.05.04.2.01.09   | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran   | 3                      | Dokumen            | 2                                 | 66,67 |
| 1.05.04.2.02  | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran   | Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya  | 100                    | Persen             | 100                               | 100   |
| 1.05.04.2.02.01   | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran   | 12                     | dokumen            | 3                                 | 25    |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/ Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |                 | Realisasi Capaian s/d Triwulan II |       |
|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
|  |   |  | Target                 | Satuan          | Fisik                             | %     |
| 1.05.04.2.04   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran  | Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran  | 100                    | persen          | 100                               | 100   |
| 1.05.04.2.04.01  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | 320                    | Orang           | 100                               | 31,25 |
| 1.05.04.2.04.02  | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran   | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 21                     | Desa/ Kelurahan | 0                                 | 0     |
| 1.05.04.2.05   | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia   | Persentase penanganan kondisi membahayakan   | 100                    | persen          | 100                               | 100   |
| 1.05.04.2.05.01  | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia   | 24                     | laporan         | 12                                | 50    |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif minim gangguan *trantibum*. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan ketenangan dan ketentraman masyarakat serta semangat motivasi bekerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;



4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
9. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
10. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja Satpol PP dalam bertugas seperti patroli rutin, pengamanan kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian, pengamanan obyek-obyek vital guna menjaga ketertiban umum;
2. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat guna membangun hubungan yang kuat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Peningkatan pemantauan dan teknologi keamanan seperti kamera pengawas pada ATCS dan menghimbau pelanggar Perda melalui pengeras suara yang ada;
4. Peningkatan penegakan Perda dengan memperkuat sistem penegakan Perda seperti intelejen/deteksi dini, penanganan pelanggaran Perda dan pemberian efek jera pada pelanggar;

5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik keamanan yang berkaitan dengan kebakaran, seperti penggunaan listrik yang aman, pengelolaan limbah yang tepat, dan pemeliharaan peralatan rumah tangga. Selain itu, melakukan inspeksi rutin pada bangunan dan fasilitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko kebakaran;
6. Peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dan sarana prasarana pemadam kebakaran diharapkan dapat optimal dalam menangani kebakaran;
7. Membangun kerjasama yang erat antara pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya seperti polisi, rumah sakit, dan dinas pemadam kebakaran lainnya. Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanggulangan kebakaran dan evakuasi yang aman.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing-masing sub kegiatan. Namun demikian ada yang perlu menjadi catatan, antara lain:
  - a. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD, serapan anggaran pada Triwulan II sebesar Rp. 84.067.029,00 dari anggaran penetapan sebesar Rp. 88.000.000,00 sehingga capaian sampai dengan Triwulan II adalah 95,53%, sehingga perlu ada tambahan anggaran guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing-masing sub kegiatan. Namun demikian ada yang perlu menjadi catatan, antara lain:

- a. Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum perlu penambahan anggaran guna kegiatan pemberdayaan anggota Satlinmas Tk. Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing-masing sub kegiatan.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekalongan 2021-2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan memiliki tanggung jawab dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Pekalongan baik dari segi akses maupun kualitas. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pada tahun 2023 capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian 100%
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100%

Selanjutnya guna mengampu upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM Ketentraman dan ketertiban umum, pada tahun 2024 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan melaksanakan 3 program yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Rencana kerja perubahan dan pendanaan tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan secara rinci kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Perubahan Renja 2023

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |         | Pagu APBD Perubahan |
|---|--|---|------------------------|---------|---------------------|
|   |  |   | Target                 | Satuan  |                     |
| 1   | 2  | 3   | 4                      | 5       | 6                   |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000  | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                            |   |                        |         | 13.157.628.000,00   |
| 1.05  | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |   |                        |         | 13.157.628.000,00   |
| 1.05.01   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja   | 100                    | persen  | 5.558.043.000,00    |
|   |  | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100                    | persen  |                     |
|   |  | Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah   | 100                    | persen  |                     |
| 1.05.01.2.01  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                | 100                    | persen  | 15.960.000,00       |
| 1.05.01.2.01.01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2                      | dokumen | 2.320.000,00        |
| 1.05.01.2.01.02   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2                      | dokumen | 1.640.000,00        |
| 1.05.01.2.01.07   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 15                     | Laporan | 12.000.000,00       |
| 1.05.01.2.02  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah  | 100                    | persen  | 4.730.987.000,00    |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |             | Pagu APBD Perubahan |
|---|--|--|------------------------|-------------|---------------------|
|   |  |  | Target                 | Satuan      |                     |
| 1   | 2  | 3  | 4                      | 5           | 6                   |
| 1.05.01.2.02.01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 41                     | Orang/bulan | 4.669.367.000,00    |
| 1.05.01.2.02.03   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12                     | Dokumen     | 60.100.000,00       |
| 1.05.01.2.02.05   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1                      | Laporan     | 1.520.000,00        |
| 1.05.01.2.05.02   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah  | 100                    | persen      | 5.000.000,00        |
| 1.05.01.2.05.02   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 1                      | Paket       | 5.000.000,00        |
| 1.05.01.2.06  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah   | 100                    | persen      | 248.720.000,00      |
| 1.05.01.2.06.01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 4                      | Paket       | 5.625.000,00        |
| 1.05.01.2.06.02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4                      | Paket       | 29.195.000,00       |
| 1.05.01.2.06.03   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 4                      | Paket       | 7.500.000,00        |
| 1.05.01.2.06.04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 4                      | Paket       | 96.400.000,00       |
| 1.05.01.2.06.05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2                      | Paket       | 7.500.000,00        |
| 1.05.01.2.06.06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 2                      | Dokumen     | 2.500.000,00        |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |            | Pagu APBD Perubahan |
|---|--|--|------------------------|------------|---------------------|
|   |  |  | Target                 | Satuan     |                     |
| 1   | 2  | 3  | 4                      | 5          | 6                   |
| 1.05.01.2.06.09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 110                    | orang/kali | 100.000.000,00      |
| 1.05.01.2.08  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100                    | persen     | 127.651.000,00      |
| 1.05.01.2.08.01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4                      | Laporan    | 2.000.000,00        |
| 1.05.01.2.08.02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12                     | Laporan    | 125.651.000,00      |
| 1.05.01.2.09  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100                    | persen     | 429.725.000,00      |
| 1.05.01.2.09.01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 29                     | Unit       | 369.230.000,00      |
| 1.05.012.09.09  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2                      | Unit       | 30.495.000,00       |
| 1.05.01.2.09.10   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 66                     | Unit       | 30.000.000,00       |
| 1.05.02   | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan   | 82                     | persen     | 6.587.360.000,00    |
| 1.05.02.2.01  | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)   | 90                     | persen     | 2.492.736.000,00    |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |         | Pagu APBD Perubahan |
|---|---|---|------------------------|---------|---------------------|
|   |   |   | Target                 | Satuan  |                     |
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5       | 6                   |
| 1.05.02.2.01.01   | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 300                    | Laporan | 43.000.000,00       |
| 1.05.02.2.01.02   | Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 2000                   | Laporan | 213.480.000,00      |
| 1.05.02.2.01.03   | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                      | 40                     | Dokumen | 1.976.146.000,00    |
| 1.05.02.2.01.04   | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 2                      | Dokumen | 102.270.000,00      |
| 1.05.02.2.01.05   | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia          | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 155                    | Orang   | 21.100.000,00       |
| 1.05.02.2.01.06   | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan   | 2                      | Dokumen | 123.500.000,00      |



| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |         | Pagu APBD Perubahan |
|---|--|--|------------------------|---------|---------------------|
|   |  |  | Target                 | Satuan  |                     |
| 1   | 2  | 3  | 4                      | 5       | 6                   |
| 1.05.02.2.01.09   | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada                  | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 4                      | Laporan | 13.240.000,00       |
| 1.05.02.2.02  | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                       | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)  | 20                     | Perda   | 4.092.693.000,00    |
| 1.05.02.2.02.10   | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 12                     | Laporan | 51.699.000,00       |
| 1.05.02.2.02.02   | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 48                     | Laporan | 15.000.000,00       |
| 1.05.02.2.02.03   | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP   | 12                     | Laporan | 4.025.994.000,00    |
| 1.05.02.2.03  | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                  | Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS   | 13                     | persen  | 1.931.000,00        |
| 1.05.02.2.03.01   | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS   | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda   | 1                      | laporan | 1.931.000,00        |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |                 | Pagu APBD Perubahan |
|---|---|---|------------------------|-----------------|---------------------|
|   |   |   | Target                 | Satuan          |                     |
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5               | 6                   |
| 1.05.04   | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   | 100                    | persen          | 1.012.225.000,00    |
| 1.05.04.2.01  | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran   | 100                    | persen          | 826.313.000,00      |
| 1.05.04.2.01.01   | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya   | 4                      | Dokumen         | 24.750.000,00       |
| 1.05.04.2.01.02   | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 250                    | Laporan         | 734.013.000,00      |
| 1.05.04.2.01.07   | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran  | 38                     | Orang           | 15.000.000,00       |
| 1.05.04.2.01.08   | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)             | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 2                      | Desa/ Kelurahan | 7.500.000,00        |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Pergeseran APBD |         | Pagu APBD Perubahan |
|---|---|---|------------------------|---------|---------------------|
|   |   |   | Target                 | Satuan  |                     |
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5       | 6                   |
| 1.05.04.2.01.08   | Pengadaan Sarana dan Prasarana, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri  | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                  | 3                      | Unit    | 11.250.000,00       |
| 1.05.04.2.01.09   | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 3                      | Dokumen | 33.800.000,00       |
| 1.05.04.2.02  | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran   | Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya  | 100                    | persen  | 34.071.000,00       |
| 1.05.04.2.02.01   | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran   | 12                     | Dokumen | 34.071.000,00       |
| 1.05.04.2.04  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran  | Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran   | 100                    | persen  | 97.328.000,00       |
| 1.05.04.2.04.01   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat  | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya  | 320                    | Orang   | 37.500.000,00       |

| Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan | Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Pergeseran APBD |                    | Pagu APBD Perubahan |
|---|---|--|------------------------|--------------------|---------------------|
|   |   |  | Target                 | Satuan             |                     |
| 1   | 2   | 3  | 4                      | 5                  | 6                   |
| 1.05.04.2.04.02   | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran   | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 21                     | Desa/<br>Kelurahan | 59.828.000,00       |
| 1.05.04.2.05  | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia   | Persentase penanganan kondisi membahayakan   | 100                    | persen             | 54.513.000,00       |
| 1.05.04.2.05.01   | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia   | 24                     | Laporan            | 54.513.000,00       |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun sebagai upaya pencapaian Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan 2021-2026 dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan segenap jajaran Satpol P3KP dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan secara konsisten dalam mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, melaksanakan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM guna peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekalongan.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Tak lupa kami mohon masukan, kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,  
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kota Pekalongan,

  
**SRIYANA, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680709 199003 1 008